



ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK 2023



kerjasama



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



Departemen Statistika – FMIPA
Institut Pertanian Bogor



Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2023

Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2023

Ukuran Buku / *Book Size* : A4 29.7 cm × 21.0 cm

Jumlah halaman / *Total size* : 53 halaman / *page*

Naskah / *Manuscript* : Fakultas Matematika dan IPA,
IPB University

Gambar kulit dan Seting / *Cover design and Setting*: Fakultas Matematika dan IPA,
IPB University

Diterbitkan oleh / *Published by* : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2023 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2023 ini menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk yang terjadi di Kota Depok. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan kecemburuan sosial yang lebar dan tajam, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan berbagai masalah. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA-IPB) yang telah menyusun Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2023, begitu juga kepada semua pihak yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, September 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok,



Drs. Manto, MSi

NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Kami dapat mempersembahkan buku berjudul "Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2023". Buku ini hadir sebagai sebuah upaya untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji permasalahan ketimpangan pendapatan yang ada di wilayah Kota Depok.

Pembangunan ekonomi telah menjadi isu sentral dalam upaya mencapai kemajuan suatu wilayah. Ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga tentang bagaimana dampak pembangunan tersebut dirasakan oleh semua lapisan penduduk. Ketidaksetaraan pendapatan di dalam masyarakat mungkin sulit dihindari sepenuhnya, namun harus tetap dalam kontrol agar tidak menimbulkan masalah sosial ekonomi yang serius seperti kecemburuan sosial.

Buku ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Badan Pusat Statistik yang telah menjadi sumber data utama dalam penyusunan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini tidak hanya menjadi bacaan informatif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perencanaan pembangunan di Kota Depok secara keseluruhan.

Wassalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, September 2023
Ketua Departemen Statistika
FMIPA – IPB University



Dr. Bagus Sartono

NIP. 19780411 200501 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sumber Data	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi	4
2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok	8
BAB III KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK	11
3.1. Gambaran Umum Kota Depok	11
3.2. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2023 berdasarkan Indeks Gini 16	
3.3. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2023 menurut Bank Dunia	18
3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2013-2023	19
3.5. Nilai Tingkat Ketimpangan Kecamatan Kota Depok Tahun 2023	24
3.5.1. Ketimpangan Kecamatan Sawangan Tahun 2023	24
3.5.2. Ketimpangan Kecamatan Bojongsari Tahun 2023	26
3.5.3. Ketimpangan Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2023	28
3.5.4. Ketimpangan Kecamatan Cipayung Tahun 2023	30
3.5.5. Ketimpangan Kecamatan Sukmajaya Tahun 2023	32
3.5.6. Ketimpangan Kecamatan Cilodong Tahun 2023	34
3.5.7. Ketimpangan Kecamatan Cimanggis Tahun 2023	37
3.5.8. Ketimpangan Kecamatan Tapos Tahun 2023	39

3.5.9. Ketimpangan Kecamatan Beji Tahun 2023	41
3.5.10. Ketimpangan Kecamatan Limo Tahun 2023	43
3.5.11. Ketimpangan Kecamatan Cinere Tahun 2023	45
3.6. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok Tahun 2023	47
3.7. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok tahun 2021-2023.	48
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan.....	12
Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran.....	13
Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha	14
Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	15
Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2023 di Kota Depok.....	16
Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2023.....	18
Tabel 7 PDRB Kota Depok 2013-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	20
Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2013-2023.....	21
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok 2013-2022	22
Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2021-2023.....	23
Tabel 11 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Sawangan	25
Tabel 12 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sawangan 2023.....	26
Tabel 13 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Bojongsari	27
Tabel 14 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Bojongsari 2023.....	28
Tabel 15 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Pancoran Mas.....	29
Tabel 16 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Pancoran Mas 2023	30
Tabel 17 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cipayung.....	31
Tabel 18 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cipayung 2023	32
Tabel 19 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Sukmajaya	33
Tabel 20 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sukmajaya 2023.....	34
Tabel 21 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cilodong.....	35

Tabel 22 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cilodong 2023.....	36
Tabel 23 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cimanggis.....	37
Tabel 24 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cimanggis 2023	38
Tabel 25 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Tapos.....	39
Tabel 26 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Tapos 2023.....	40
Tabel 27 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Beji	41
Tabel 28 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Beji 2023.....	42
Tabel 29 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Limo.....	43
Tabel 30 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Limo 2023.....	44
Tabel 31 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cinere	45
Tabel 32 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cinere 2023.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kurva Lorenz.....	10
Gambar 2 Kurva Lorenz Kota Depok 2023.....	17
Gambar 3 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).....	19
Gambar 4 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2013-2023	21
Gambar 5 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2021- 2023	23
Gambar 6 Kurva Lorenz Kecamatan Sawangan 2023	25
Gambar 7 Kurva Lorenz Kecamatan Bojongsari 2023	27
Gambar 8 Kurva Lorenz Kecamatan Pancoran Mas 2023	29
Gambar 9 Kurva Lorenz Kecamatan Cipayung 2023	31
Gambar 10 Kurva Lorenz Kecamatan Sukmajaya 2023.....	33
Gambar 11 Kurva Lorenz Kecamatan Cilodong 2023	36
Gambar 12 Kurva Lorenz Kecamatan Cimanggis 2023	38
Gambar 13 Kurva Lorenz Kecamatan Tapos 2023	40
Gambar 14 Kurva Lorenz Kecamatan Beji 2023.....	42
Gambar 15 Kurva Lorenz Kecamatan Limo 2023	44
Gambar 16 Kurva Lorenz Kecamatan Cinere 2023.....	46
Gambar 17 Nilai Gini Ratio Kecamatan Kota Depok 2023.....	47
Gambar 18 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok 2023	48
Gambar 19 Nilai Gini Ratio Kecamatan Kota Depok Tahun 2021 – 2023.....	49
Gambar 20 Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terendah Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok Tahun 2021-2023.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perubahan yang terencana guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan disebut pembangunan. Proses perubahan ini mencakup keseluruhan system sosial, seperti ekonomi, politik, pertahanan, infrastruktur teknologi, pendidikan, kelembagaan dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan pada sektor ekonomi sebagai salah satu sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan merupakan salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi melibatkan berbagai sektor seperti pemerintah, swasta dan masyarakat umum. Menurut Siedman (2005), pembangunan ekonomi adalah proses pembuatan dan pemanfaatan sumber daya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk membuat suatu perbaikan serta pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk melihat indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah karena laju pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat luas. Sebagai salah satu contoh, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat pada umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Terciptanya lapangan kerja dalam jumlah memadai sehingga menghasilkan tingkat pengangguran yang rendah juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya merupakan indikator makro utama yang kerap kali digunakan pada berbagai perbincangan tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan ekonomi di suatu pemerintahan berjalan efektif, pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan periode sebelumnya menjadi penting.

Menurut Tambunan (2001), kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang dilakukan akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu rentang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan ketimpangan antar golongan masyarakat dan kesenjangan antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2011-2021 tanpa melibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 memiliki rata-rata sebesar 6,71. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (tanpa melibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020) yaitu sebesar 5,49. Secara makro, nilai tersebut dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kuat. Namun demikian, adanya pandemik Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 membuat pemerintah Kota Depok perlu mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan kesejahteraan masyarakat dan apakah ketimpangan antar golongan masyarakat di Kota Depok masih berimbang pada tahun 2023 ini. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan suatu alat untuk mengukur ketimpangan antar golongan masyarakat, diantaranya dengan menggunakan gini ratio dan Ukuran Ketimpangan menurut Bank Dunia.

Perhitungan indikator ketimpangan pendapatan misalnya Indeks Gini Rasio umumnya menggunakan data Susenas yang akurasi didesain minimal sampai tingkat kabupaten/kota. Sementara untuk perhitungan indikator ketimpangan tingkat kecamatan, perhitungan langsung berdasarkan data Susenas dikhawatirkan kurang akurat akibat ukuran sampel yang kurang memadai. Tidak memadainya ukuran sampel dapat diatasi dengan menambah jumlah sampel melalui survei, namun dengan jumlah 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok maka survei terkait pengukuran indikator ketimpangan akan membutuhkan dana dan usaha yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan

pengukuran dengan penggunaan metode pendugaan area kecil (*small area estimation*). *Small Area Estimation* (SAE) adalah suatu teknik statistika untuk menduga parameter-parameter sub populasi yang ukuran sampelnya (contoh) kecil, sedangkan area kecil didefinisikan sebagai himpunan bagian dari populasi (sub populasi) yang ukuran contohnya kecil dengan suatu peubah tertentu yang menjadi perhatian (Rao dan Molina, 2015).

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis kondisi ketimpangan ekonomi Kota Depok tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio dan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, sehingga akan diperoleh :

- a. Nilai indeks Gini Ratio Kota Depok tahun 2023 beserta kategorinya, disandingkan dengan indeks Gini Ratio Kota Depok tahun-tahun sebelumnya;
- b. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2023 beserta kategorinya, disandingkan dengan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Nilai Indeks Gini Ratio Kecamatan Kota Depok tahun 2023 beserta kategorinya;
- d. Ukuran Ketimpangan menurut Bank Dunia Kecamatan Kota Depok Tahun 2023 beserta kategorinya;
- e. Analisis mengenai hasil yang ada.

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan Gini Ratio Kota Depok tahun 2023 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 khususnya data KOR (data dasar), PDRB Kota Depok 2022, dan Data Jumlah Penduduk Kota Depok 2022. Sumber data tersebut berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Depok dan BPS Pusat.

BAB II METODOLOGI

2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena di mana pemerataan pendapatan dan peluang dalam masyarakat tidak tercapai secara merata. Masalah ini melintasi hampir seluruh negara di dunia, seringkali mengakibatkan individu yang berada dalam kondisi kemiskinan menghadapi keterbatasan dalam upaya mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa kelahiran dalam kemiskinan tidak secara otomatis menentukan nasib seseorang. Pendidikan, pengembangan keterampilan, serta penerapan kebijakan pelatihan dapat bersinergi dengan program-program bantuan sosial untuk membantu individu keluar dari jeratan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang ada. Terdapat beberapa jenis ketimpangan ekonomi yang bisa disebutkan yaitu antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan di antara berbagai individu, keluarga, atau kelompok dalam suatu masyarakat atau wilayah. Fenomena ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat pendapatan yang diterima oleh berbagai segmen populasi. Pendapatan bukan hanya uang yang diterima melalui pembayaran, tetapi semua uang yang diterima dari pekerjaan (upah, gaji, bonus, dll.), investasi, seperti bunga pada rekening tabungan dan dividen dari saham, tabungan, tunjangan negara, pensiun (negara), pribadi, perusahaan) dan sewa. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan secara individu atau rumah tangga - pendapatan semua orang yang berbagi rumah tangga tertentu. Pendapatan rumah tangga sebelum pajak yang mencakup uang yang diterima dari sistem jaminan sosial dikenal sebagai pendapatan kotor. Pendapatan rumah tangga termasuk semua pajak dan tunjangan dikenal sebagai pendapatan bersih.

2. Ketimpangan Bayaran/Upah

Ketimpangan bayaran atau upah merujuk pada perbedaan dalam tingkat penghasilan atau gaji yang diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat atau dalam sektor tertentu. Fenomena ini terjadi ketika beberapa orang atau kelompok mendapatkan kompensasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain untuk pekerjaan yang serupa atau sebanding. Bayaran mengacu pada pembayaran dari pekerjaan saja. Ini dapat dilakukan setiap jam, bulanan atau tahunan, biasanya dibayar mingguan atau bulanan dan mungkin juga termasuk bonus. Oleh karena itu, ketimpangan pembayaran menjelaskan perbedaan antara upah orang dan ini mungkin berada dalam satu perusahaan.

3. Ketimpangan Kekayaan

Ketimpangan kekayaan merujuk pada perbedaan dalam kepemilikan aset, kekayaan, dan harta benda di antara individu, keluarga, atau kelompok dalam suatu masyarakat atau wilayah. Fenomena ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat kekayaan yang dimiliki oleh berbagai segmen populasi. Umumnya, ketimpangan kekayaan mengacu pada situasi di mana sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki sebagian besar kekayaan nasional, sementara mayoritas penduduk hanya memiliki sebagian kecil dari kekayaan tersebut.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan kekayaan telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memiliki peran penting dalam membentuk ketimpangan kekayaan. Sebagian besar studi menemukan pendidikan menjadi faktor penting yang menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih luas antara si miskin dan si kaya (Chongvilaivan dan Kim 2015; De Silva dan Sumarto 2013). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa akses ke masalah keuangan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan (Wan dan Zhou 2004; Bae, Han, dan Son 2012). Menurut penelitian oleh World Bank (2016), ada beberapa penyebab utama

ketimpangan pendapatan di Indonesia: (i) kesempatan tidak merata, (ii) pekerjaan yang tidak setara, (iii) konsentrasi kekayaan yang tinggi, dan (iv) resiliensi rendah.

Ketidakterataan akses pendidikan dapat menimbulkan ketidaksetaraan di masa depan karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung melakukan pekerjaan bergaji rendah, yang biasanya di sektor sektor informal. Perbedaan dalam akumulasi kekayaan juga penting dalam menentukan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi potensi penghasilan anggota rumah tangga di masa depan.

Pendidikan, kekayaan, serta sektor pekerjaan merupakan kontributor signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menurut Wicaksono, Amir dan Nugroho (2017). Temuan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang bertujuan mengurangi akses yang tidak merata ke pendidikan dan keuangan penting untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan di masa depan.

Ketimpangan ekonomi dapat diukur dari beberapa alat ukur diantaranya Koefisien Gini, Ukuran Rasio, Palma Ratio, dan ukuran menurut Bank Dunia. Pilihan ukuran tidak mengubah seperti apa bentuk ketimpangan secara dramatis, namun perubahan ketimpangan dari waktu ke waktu di masing-masing negara dapat terlihat berbeda jika digunakan langkah yang berbeda (The Equality Trust, 2011).

Ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan:

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini mengukur ketimpangan di seluruh masyarakat daripada hanya membandingkan berbagai kelompok pendapatan. Jika semua pendapatan pergi ke satu orang (ketimpangan maksimum) dan semua orang tidak mendapat apa-apa, koefisien Gini akan sama dengan 1. Jika pendapatan dibagi sama rata, dan semua orang mendapatkan sama persis, Gini akan sama dengan 0. Semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin setara masyarakat.

Koefisien Gini dapat mengukur ketimpangan sebelum atau sesudah pajak dan sebelum atau setelah biaya perumahan. Gini akan berubah

tergantung pada apa yang diukur. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- $G < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang
- $G > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

2. Ukuran Rasio

Ukuran rasio membandingkan berapa banyak orang di satu tingkat distribusi pendapatan dibandingkan dengan orang di tingkat lain. Misalnya, rasio 20:20 membandingkan seberapa kaya 20% orang teratas, dibandingkan dengan 20% terbawah.

Rasio yang umum digunakan antara lain:

- Rasio 50/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian tengah dan bagian bawah dari distribusi pendapatan
- 90/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan bagian bawah
- 90/50 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan tengah
- 99/90 - menjelaskan ketimpangan antara bagian paling atas dan atas

3. Palma Ratio

Palma Ratio adalah rasio bagi hasil dari 10% teratas dengan 40% terbawah. Dalam masyarakat yang lebih setara, rasio ini akan menjadi satu atau lebih rendah, yang berarti bahwa 10% teratas tidak menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional dari 40% terbawah. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, rasionya mungkin sebesar 7.

4. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Bank Dunia menggolongkan penduduk ke dalam 3 kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan dengan dasar pengelompokan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok

Ketimpangan ekonomi antar wilayah disebabkan oleh ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi di antara kelompok- kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Data pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, namun pada kenyataannya data pendapatan sulit diperoleh, sehingga

pengukuran ketimpangan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan.

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Untuk menghitung Indeks Gini dibutuhkan kurva Lorenz. Ide dasar perhitungan koefisien Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan.

Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Secara umum, kurva ini sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal (Gambar 1 – Kurva Lorenz). Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi. Adapun rumus umum koefisien Gini adalah sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n [fp_i(Fc_i + Fc_{i-1})]$$

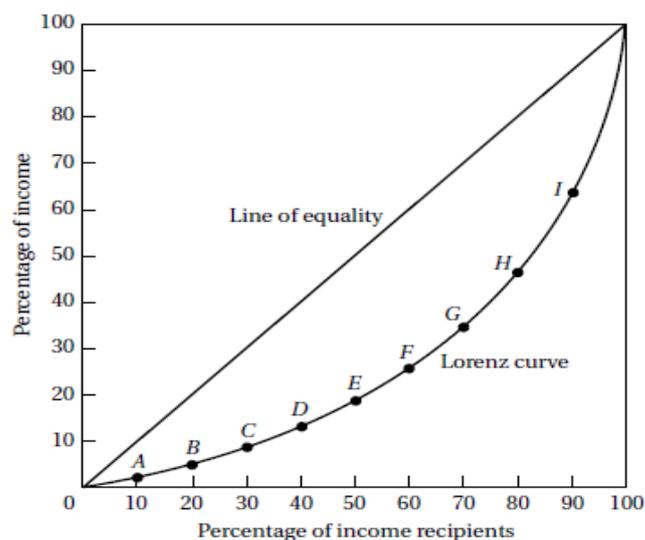
dimana

GR : Koefisien Gini

fp_i : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)



Gambar 1 Kurva Lorenz

Indikator lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia, dimana kriteria ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan. Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

dimana

YD_4 : Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan ke $i - 1$

P_i : Persentase kumulatif penduduk ke i

q_i : Persentase pendapatan ke i

BAB III KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK

3.1. Gambaran Umum Kota Depok

Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara astronomis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur (<https://depok.go.id/geografi>). Kota ini berbatasan dengan Jakarta di sebelah utara dan berbatasan dengan Kabupaten Bogor di sebelah selatan, timur, dan barat. Depok merupakan salah satu bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lokasi strategis letak wilayah Kota Depok ini menyebabkan kota ini semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang terhubung secara regional dengan kota-kota lainnya. Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif apabila dilihat dari letaknya yang sangat strategis baik dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar $200,29 \text{ km}^2$ terdiri dari 11 kecamatan dengan 63 kelurahan. Adapun kecamatannya adalah Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo dan Cinere. Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2010 berdasarkan angka sensus 2010 adalah 1.738.570, jumlah penduduk sementara tahun 2020 berdasarkan sensus 2020 adalah 2.056.335. Jumlah penduduk tahun 2022 mengacu pada Kota Depok dalam Angka 2023 sebanyak 2.123.349 jiwa, sementara berdasarkan proyeksi jumlah penduduk untuk 2023 yaitu 2.145.399. Sementara proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yaitu tahun 2023 untuk laki-laki sebanyak 1.080.538 jiwa dan perempuan

sebanyak 1.064.861 jiwa (Tabel 1). Jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 101,47. Sementara proyeksi Angka Beban Tanggungan (ABT) di kota Depok untuk tahun 2023 adalah 40.75%, dengan kata lain rasio ketergantungan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh anggota populasi yang bekerja dalam mendukung anggota non-produktif di kota Depok sebesar 40.75%.

Tabel 1 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa) Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	86.50	82.54	169.04
5 - 9	83.97	80.41	164.38
10 -14	86.59	82.32	168.90
15 - 19	89.56	83.69	173.24
20 - 24	83.10	79.83	162.93
25 - 29	82.43	81.62	164.05
30 - 34	86.29	88.17	174.46
35 - 39	87.89	89.30	177.20
40 - 44	87.51	86.06	173.57
45 - 49	83.02	80.20	163.21
50 - 54	70.57	68.67	139.24
55 - 59	56.63	56.36	112.99
60 - 64	40.94	42.46	83.40
65 - 69	27.53	29.74	57.26
70 - 74	16.63	18.75	35.39
75+	11.40	14.75	26.15
Total	1080.54	1064.86	2145.40

Keterangan: hasil perhitungan

Proyeksi pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Depok untuk tahun 2023 disajikan pada Tabel 2. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok 10 persen terbawah adalah sejumlah Rp. 720.988,09 per kapita per bulan dengan simpangan baku 145.156,06. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 350.971,41 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 938.430,87 per orang setiap bulannya. Besaran pengeluaran meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Rata-rata pengeluaran pada kelompok 10 persen teratas adalah sebesar Rp. 8.167.076,70 per kapita per bulan dengan simpangan baku Rp.2.497.523,70, melonjak hampir 1.66 kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran di bawahnya yang sebesar Rp. 4.914.568,8 per orang per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 5.862.275 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 20.316.968,70 per orang setiap bulannya.

Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2023

No	Kelompok Pengeluaran (Rp)	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			
		Rata-rata (Rp)	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)	Simpangan Baku (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<=938.430,9	720.988,1	350.971,41	938.430,9	145.156,1
2	938.430,9-1.212.048,5	1.079.853,8	942.554,6	1.212.048,5	80.330,5
3	1.212.048,5-1.493.562,9	1.363.167,9	1.212.569,3	1.493.562,9	81.171,2
4	1.493.562,9-1.724.717,8	1.617.354,7	1.494.516,3	1.724.717,8	66.263,2
5	1.724.717,8-2.001.108,9	1.866.688,6	1.726.911,9	2.001.108,9	82.084,5
6	2.001.108,9-2.607.926,5	2.320.575,7	2.001.633,3	2.607.926,5	186.245,6
7	2.607.926,5-3.360.681,6	2.973.656,1	2.608.198,6	3.360.681,6	199.554,5
8	3.360.681,6-4.282.278,9	3.773.952,2	3.369.234,6	4.282.278,9	260.964,7
9	4.282.278,9-5.856.154,3	4.914.568,8	4.295.470,2	5.856.154,3	453.398,3
10	>5.856.154,3	8.167.076,7	5.862.275	20.316.968,7	2.497.523,7

Keterangan: hasil perhitungan

Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2023

Lapangan Usaha	Kelompok Pengeluaran (Rp)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Pertanian	0,54	2,66	2,57	2,07	2,09	1,08	2,92	10,00	2,09	2,80
Pertambangan dan penggalian	8,76	9,90	8,13	12,42	17,95	9,69	11,27	2,23	3,85	11,17
Industri Pengolahan	15,24	16,43	19,37	28,42	8,49	21,56	26,13	19,17	15,58	17,13
Listrik, Air dan Gas	10,99	9,97	9,29	4,13	8,24	6,27	5,35	0,74	6,77	8,48
Konstruksi/bangunan	4,89	0,00	0,00	1,25	1,91	1,33	0,00	0,00	2,24	0,82
Perdagangan, hotel, dan rumah makan	22,89	21,25	18,41	23,02	25,75	28,66	15,65	15,44	24,47	21,82
Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi	32,31	28,09	38,83	26,19	26,90	23,41	33,03	40,94	35,66	30,10
Keuangan dan asuransi	4,39	10,95	3,41	2,51	8,68	6,62	5,66	8,48	8,44	4,76
Jasa dan lainnya	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	2,99	0,90	2,92
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: hasil perhitungan

Ketimpangan ekonomi dapat muncul ketika akses ke berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi tidak merata. Beberapa sektor mungkin menawarkan gaji dan kesempatan kerja yang lebih tinggi daripada sektor lainnya. Jika sebagian besar kesempatan berada di sektor yang lebih makmur dan hanya sedikit tersedia di sektor lainnya, maka ketimpangan pendapatan antara pekerja di sektor tersebut dapat meningkat. Tabel 3 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk menurut lapangan usaha dan kelompok pengeluaran pada tahun 2023. Sebagian besar penduduk pada setiap kelompok pengeluaran menjadikan sektor Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi sebagai lapangan usahanya kecuali pada kelompok pengeluaran ke-4 dan ke-6. Pada kelompok 10 persen pengeluaran terbawah dan kelompok 10 persen pengeluaran teratas dengan masing-masing persentasenya adalah 32,31 persen dan 30,10 persen. Sektor Perdagangan, hotel, dan rumah makan merupakan lapangan usaha tertinggi kedua dari kedua kelompok pengeluaran dengan masing-masing persentasenya adalah

22,89 persen untuk kelompok 10 persen pengeluaran terendah dan 21,821 persen untuk kelompok 10 persen pengeluaran teratas. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa Sektor jasa dan lainnya menjadi lapangan usaha paling rendah di antara semua sektor lapangan usaha yang ada.

Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	<SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SLTA/ sederajat	Universitas	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=938.430,9	0,00	29,31	25,73	43,62	1,34	100
938.430,9-1.212.048,5	1,70	22,79	19,28	50,79	5,44	100
1.212.048,5-1.493.562,9	4,01	20,53	21,81	42,38	11,26	100
1.493.562,9-1.724.717,8	1,38	25,93	12,60	46,35	13,73	100
1.724.717,8-2.001.108,9	0,00	9,66	20,87	52,10	17,37	100
2.001.108,9-2.607.926,5	2,08	19,28	18,06	48,78	11,80	100
2.607.926,5-3.360.681,6	0,77	13,77	14,04	47,39	24,03	100
3.360.681,6-4.282.278,9	1,62	5,84	6,76	45,37	40,42	100
4.282.278,9-5.856.154,3	0,00	3,99	8,15	34,47	53,39	100
>5.856.154,3	0,00	3,51	6,92	35,92	53,65	100

Keterangan: hasil perhitungan

Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor peubah saja, namun pendidikan merupakan salah satu peubah yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah ketimpangan. Individu yang mendapatkan pendidikan yang baik atau memadai cenderung akan memiliki kesempatan pekerjaan yang layak atau kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini tentunya akan mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan mereka. Tabel 4 menyajikan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran dan tingkat Pendidikan. Setiap kelompok pengeluaran, mayoritas tingkat pendidikan penduduk adalah SLTA/ sederajat kecuali pada kelompok pengeluaran 30 persen teratas. Untuk kelompok pengeluaran 10 persen terendah terlihat bahwa kelompok ini mayoritas adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah SLTA/ sederajat diikuti tingkat pendidikan SMP/ sederajat dan SD/ sederajat. Hanya sekitar 1.34 persen penduduk pada kelompok pengeluaran ini yang berpendidikan universitas pada tahun 2023. Kelompok pengeluaran 10

persen teratas, sebagian besar penduduk merupakan lulusan Universitas dan SLTA/ sederajat. Pada kelompok ini, 35,92 persen penduduk tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat dan 53,65 persen Universitas. Namun ada sekitar 3,51 persen tingkat pendidikan SD/ sederajat pada kelompok pengeluaran ini, dan 6,92 persen untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat.

3.2. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2023 berdasarkan Indeks Gini

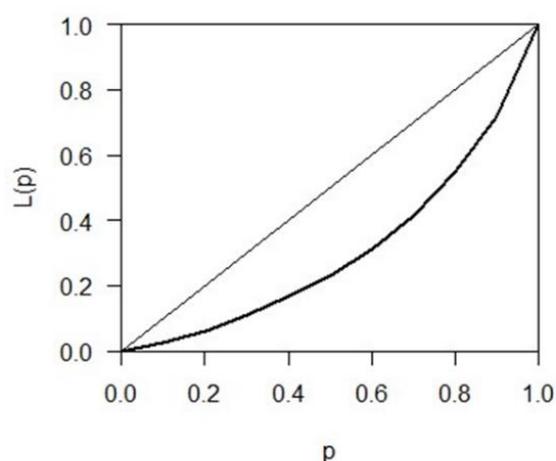
Pengeluaran per kapita memberikan gambaran tentang rata-rata pengeluaran individu dalam suatu entitas dalam periode tertentu. Ukuran ini sering digunakan untuk menganalisis tingkat kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kota Depok tahun 2023, ada sekitar 214.815 jiwa dari jumlah penduduk Kota Depok yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah berada di Rp. 720.988,09. Sedangkan ada 213.916 jiwa yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi berada di Rp. 8.167.076,70 (Tabel 5).

Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2023 di Kota Depok

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/ Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc +Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=938.430,9	720.988,09	214.815	0,10013	154.879.056.555	0,0251	
938.430,9-1.212.048,5	1.079.853,8	216.115	0,10073	233.372.603.749	0,0378	0,0089
1.212.048,5-1.493.562,9	1.363.167,9	212.894	0,09923	290.210.272.355	0,0470	0,0172
1.493.562,9-1.724.717,8	1.617.354,7	215.900	0,10063	349.186.875.896	0,0566	0,0278
1.724.717,8-2.001.108,9	1.866.688,6	215.054	0,10023	401.438.860.278	0,0651	0,0399
2.001.108,9-2.607.926,5	2.320.575,7	212.992	0,09928	494.264.049.951	0,0801	0,0539
2.607.926,5-3.360.681,6	2.973.656,1	215.196	0,10031	639.918.899.458	0,1037	0,0729
3.360.681,6-4.282.278,9	3.773.952,2	215.483	0,10044	813.222.543.263	0,1318	0,0967
4.282.278,9-5.856.154,3	4.914.568,8	213.035	0,09930	1.046.975.167.267	0,1697	0,1255
>5.856.154,3	8.167.076,7	213.916	0,09971	1.747.068.374.336	0,2831	0,1712
Jumlah		2.145.400	1,00000	6.170.536.703.109	1,0000	0,6140
Gini Ratio 2022	0,386					

Keterangan: hasil perhitungan

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi atau masyarakat. Indeks Gini mengambil nilai antara 0 hingga 1, di mana 0 mengindikasikan kesetaraan sempurna (semua orang memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama), dan 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan, sementara yang lainnya tidak memiliki sama sekali). Indeks Gini ketimpangan pendapatan di Kota Depok pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,386 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kota Depok untuk tahun 2023 ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 2). Dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2020 (0,344), 2021 (0,367) dan 2022 (0,394) menurut jabar.bps.go.id, maka Indeks Gini Kota Depok mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik pusat dan provinsi, Maret 2023 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Indeks Gini adalah sebesar 0,388 dan 0,425 untuk Provinsi Jawa Barat, sehingga kondisi ketimpangan di Kota Depok lebih rendah dibandingkan Nasional dan Jawa Barat.



Gambar 2 Kurva Lorenz Kota Depok 2023

3.3. Nilai Tingkat Ketimpangan Kota Depok Tahun 2023 menurut Bank Dunia

Bank Dunia menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kesenjangan dan ketimpangan di antara negara-negara dan dalam suatu negara. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Namun karena data pendapatan sulit untuk didapat, perhitungan indikator ini dapat menggunakan pengeluaran per kapita. Kriteria kesenjangan yang diukur yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang dilakukan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran di suatu wilayah. Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40% kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20% kelompok berpendapatan tinggi.

Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Jiwa)	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	859.724	1.195.341	1.027.663.425.653	19,5
40% menengah	858.725	2.426.495	2.083.691.583.862	39,5
20% teratas	426.951	5.078.873	2.168.429.722.397	41,1
Total	2.153.988	8.700.708	5.279.784.758.912	100

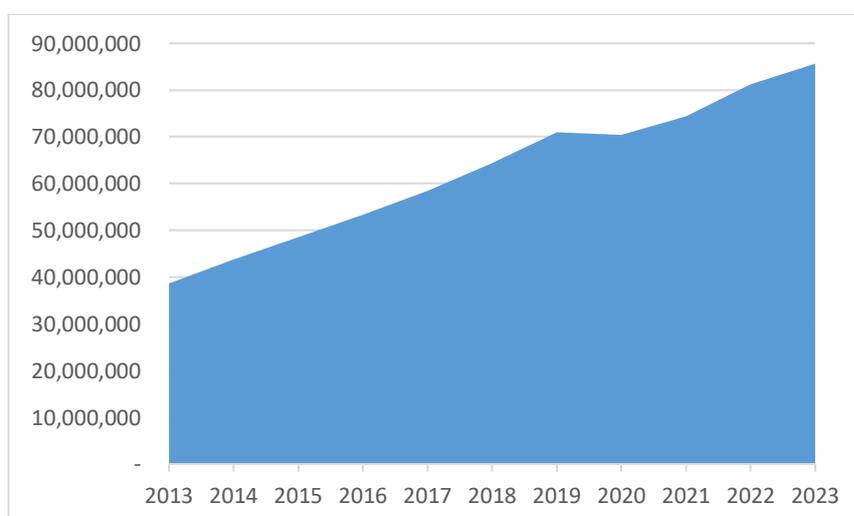
Keterangan: hasil perhitungan

Tahun 2023, ketimpangan di Kota Depok jika dilihat berdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 19,5% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 859.724 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 1.195.341. Kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 39,5 % dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 858.725 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp.2.426.495. Sementara kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 41,1% dengan proporsi

jumlah penduduk pada kelompok ini 426.951 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 5.078.873 (Tabel 6). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kota Depok berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini dapat dilihat dari proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2013-2023

Badan Pusat Statistik Kota Depok mencatat bahwa pada tahun 2021 populasi penduduk Kota Depok sebanyak 2.085.935 jiwa (Depok dalam Angka 2022). Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 29.535 jiwa dari tahun sebelumnya. Sementara hasil proyeksi tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk kota Depok sebanyak 2.123.349 jiwa (Kota Depok dalam Angka 2023) dengan kepadatan penduduk mencapai 10.601 penduduk per km², nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 10.415 penduduk per km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi antara 7.320 jiwa/km², (kecamatan Sawangan) dan 15.820 jiwa/km² (kecamatan Cipayung).



Catatan : PDRB 2021 sd 2023 hasil proyeksi

Gambar 3 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

PDRB Kota Depok tahun 2013-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) disajikan pada Tabel 7. Pada rentang waktu tersebut, PDRB Kota Depok selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. PDRB Kota Depok mencapai nilai minimum pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 38.627.196 dan mencapai nilai maksimum berdasarkan hasil proyeksi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 85.630.921 (Gambar 3). PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada periode 2013-2023 secara rata-rata sebesar Rp. 62.690.848.

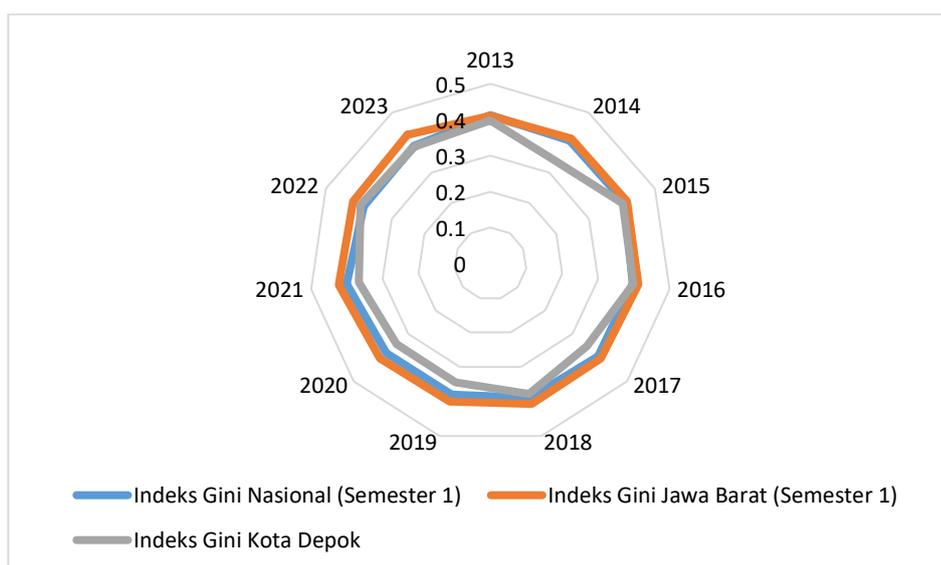
Tabel 7 PDRB Kota Depok 2013-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
[1]	[2]
2013	38,627,196
2014	43,806,035
2015	48,532,645
2016	53,331,051
2017	58,408,777
2018	64,363,244
2019	70,964,040
2020	70,386,330
2021*	74,382,340
2022*	81,166,750
2023*	85,630,921

Catatan : *hasil proyeksi

Indeks Gini secara Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok pada periode 2013-2023 disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 4. Terlihat bahwa pada periode tersebut, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun propinsi Jawa Barat, kecuali pada tahun 2016 yang sedikit di atas Nasional. Pada periode 2013-2023, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0,373, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0,395) dan Indeks Gini Propinsi Jawa Barat (0,412). Rata-rata ini menunjukkan bahwa

ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2013-2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Sejak tahun 2020, Indeks Gini di Kota Depok mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan adanya penurunan pemerataan pendapatan di Kota Depok, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan tersebut.



Catatan : BPS dan *hasil proyeksi

Gambar 4 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2013-2023

Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2013-2023

Tahun	Indeks Gini Nasional (Semester 1)	Indeks Gini Jawa Barat (Semester 1)	Indeks Gini Kota Depok
2013	0.413	0.411	0.398
2014	0.406	0.413	0.337
2015	0.408	0.415	0.402
2016	0.397	0.413	0.399
2017	0.393	0.403	0.352
2018	0.389	0.407	0.378
2019	0.380	0.400	0.344
2020	0.381	0.403	0.342
2021	0.401	0.423	0.367
2022	0.384	0.417	0.394
2023*	0.388	0.425	0.386

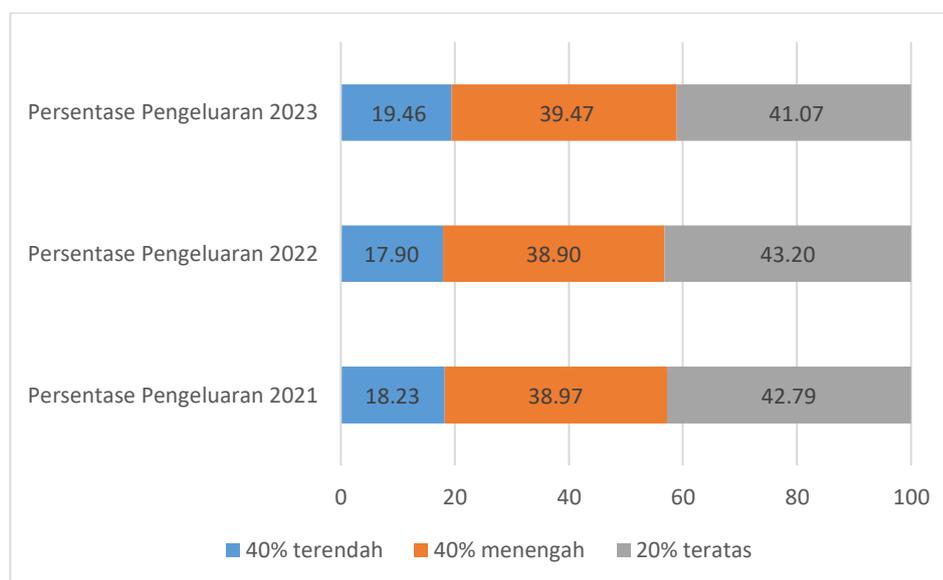
Sumber : BPS, diolah, *hasil proyeksi

Pembangunan ekonomi memiliki dampak positif, tetapi juga dapat menyebabkan dampak sampingan yang tidak diinginkan. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan adalah dua hal yang berlawanan namun sering menjadi fokus kajian bagi peneliti di bidang sosial dan ekonomi. Dalam rentang tahun 2013-2022 (Tabel 9), pertumbuhan ekonomi Kota Depok cukup tinggi (selalu di atas 6% selama periode 2013 sampai dengan 2019) dan angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun pada tahun 2020, berdasarkan Buku Kota Depok dalam angka 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Depok terjadi pada titik terendah yaitu -1,92. Hal ini terjadi karena efek pandemi COVID-19 dan hampir di seluruh kota di Indonesia pertumbuhan ekonominya negatif. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Depok mulai naik kembali di angka 3,76 hingga tahun 2022 sebesar 5.24. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama periode 2013-2022 yang tinggi masih disertai dengan adanya ketimpangan, hal ini juga terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas atau belum merata pada semua lapisan masyarakat.

Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok 2013-2022

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	Gini Ratio
[1]	[2]	[3]
2013	6.85	0.398
2014	7.28	0.337
2015	6.63	0.402
2016	7.28	0.399
2017	6.75	0.352
2018	6.97	0.378
2019	6.74	0.344
2020	-1.92	0.342
2021	3.76	0.367
2022	5.24	0.394

Sumber : BPS Kota Depok, olah



Gambar 5 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2021-2023

Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2021-2023

Kelompok Pengeluaran	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
[1]	[2]	[3]	[4]
Rata-rata pengeluaran 2021	1,134,531	2,429,081	5,363,787
Rata-rata pengeluaran 2022	1,189,247	2,584,228	5,775,001
Rata-rata pengeluaran 2023	1,195,341	2,426,495	5,078,873

Perbandingan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok untuk tiga tahun terakhir (2021 – 2023) yang disajikan pada Gambar 5. Berdasarkan perbandingan ini, tingkat ketimpangan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk selama tiga tahun terakhir lebih dari 17%. Kelompok pengeluaran 40% terendah pada tahun 2022, persentase pengeluarannya terkecil (17.90%) dibandingkan tahun 2021 (18.23%) dan 2023 (19.46%). Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok

pengeluaran ini terjadi kenaikan dari tahun ke tahun (2021-2023) yang secara berturut-turut adalah Rp.1.134.531, Rp. 1.189.247 dan Rp. 1.195.341 (Tabel 10). Persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% menengah tahun 2022 juga menjadi persentase pengeluaran terkecil jika dibandingkan 2021 dan 2023 dengan rata-rata pengeluaran terbesar dibandingkan kedua tahun lainnya. Sementara, Kelompok pengeluaran untuk 20% teratas, persentase pengeluaran tahun 2022 juga masih berada lebih besar dibandingkan dua tahun lainnya. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran teratas ini, rata-rata tertinggi ada pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 5.775.001, sementara pada tahun 2021 ada pada angka Rp. 5.363.787 dan tahun 2023 sebesar Rp. 5.078.873.

3.5. Nilai Tingkat Ketimpangan Kecamatan Kota Depok Tahun 2023

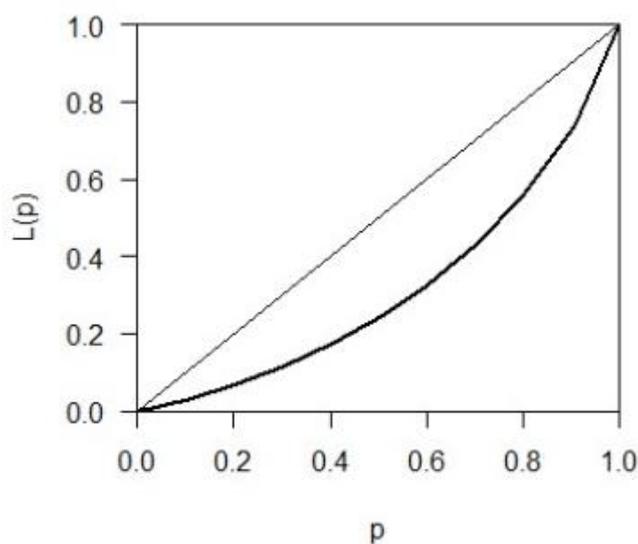
3.5.1. Ketimpangan Kecamatan Sawangan Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Sawangan pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 186.675 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Sawangan tahun 2023, sekitar 10% (19.971 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Sawangan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 869.314, dan sekitar 9% (17.723 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.8.429.601. Hampir setengah (48,93%) dari jumlah penduduk kecamatan Sawangan yaitu sekitar 91.342 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 2.260.269 (Tabel 11).

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Sawangan pada tahun 2023 sebesar 0,37117. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Sawangan pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Sawangan untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 6).

Tabel 11 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Sawangan

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_{c-1}]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.104.936,7	869.314	19.971	0,10698	17.361.064.249	0,0304	
1.104.936,7 - 1.330.312,3	1.236.080	18.711	0,10023	23.128.296.261	0,0405	0,0101
1.330.312,3 - 1.571.585,8	1.467.746	17.792	0,09531	26.114.133.720	0,0457	0,0179
1.571.585,8 - 1.930.326,6	1.777.512	19.502	0,10447	34.665.035.657	0,0606	0,0307
1.930.326,6 - 2.260.269,7	2.099.644	19.357	0,10369	40.642.810.839	0,0711	0,0441
2.260.269,7 - 2.734.133,0	2.572.011	16.994	0,09104	43.708.748.127	0,0765	0,0522
2.734.133,0 - 3.590.394,2	3.250.560	19.009	0,10183	61.789.893.786	0,1081	0,0771
3.590.394,2 - 4.353.972,4	3.957.302	18.133	0,09714	71.757.754.626	0,1255	0,0963
4.353.972,4 - 6.314.329,9	5.287.973	19.483	0,10437	103.025.572.945	0,1802	0,1354
>=6.314.329,9	8.429.601	17.723	0,09494	149.397.825.025	0,2614	0,1651
Jumlah		186.675	1,00000	571.591.135.235	1,0000	0,6288
Gini Ratio 2023	0,37117					



Gambar 6 Kurva Lorenz Kecamatan Sawangan 2023

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Sawangan kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 20,2%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 39,1%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 40,60% (Tabel 12). Berdasarkan fakta

tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Sawangan berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 12 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sawangan 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	75.976	1.337.663	101.630.275.550	20,2
40% menengah	73.493	2.677.272	196.760.738.264	39,1
20% teratas	37.206	5.491.275	204.308.377.650	40,6
	186.675	9.506.210	502.699.391.464	100

3.5.2. Ketimpangan Kecamatan Bojongsari Tahun 2023

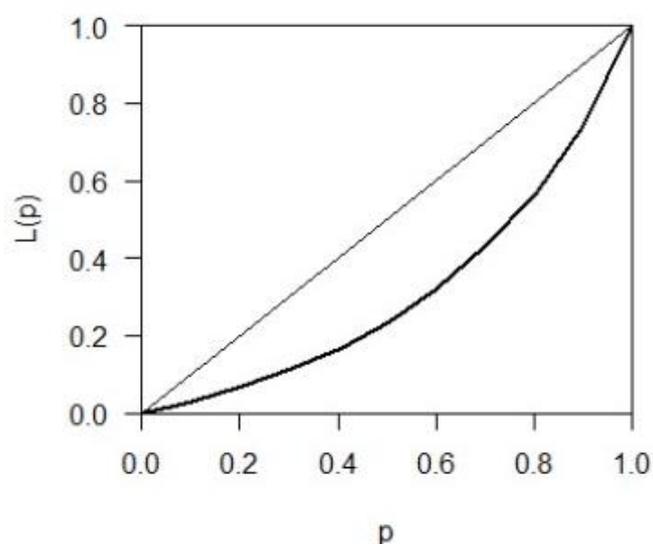
Jumlah penduduk Kecamatan Bojongsari pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 141.534 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Bojongsari tahun 2023, sekitar 11% (16.692 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Bojongsari memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 700.110, dan sekitar 8% (11.636 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.6.957.440. Hampir setengah (49,45%) dari jumlah penduduk kecamatan Bojongsari yaitu sekitar 69.994 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 1.493.562 (Tabel 13).

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Bojongsari pada tahun 2023 sebesar 0,37683. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Bojongsari pada tahun 2023 masuk dalam kategori

ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Bojongsari untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 7).

Tabel 13 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Bojongsari

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p * [F_c + F_c - 1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
$\leq 876.765,3$	700.110	16.692	0,11794	11.686.239.409	0,0390	
876.765,3 - 984.968,1	938.556	13.346	0,09430	12.525.971.391	0,0418	0,0113
984.968,1 - 1.147.667,3	1.105.085	12.877	0,09098	14.230.173.998	0,0475	0,0190
1.147.667,3 - 1.417.013,6	1.306.407	14.689	0,10378	19.189.812.335	0,0640	0,0332
1.417.013,6 - 1.493.562,9	1.465.538	13.936	0,09846	20.423.738.872	0,0681	0,0446
1.493.562,9 - 1.720.705,0	1.607.368	15.772	0,11144	25.351.413.124	0,0845	0,0674
1.720.705,0 - 2.001.108,9	1.873.927	13.370	0,09446	25.054.407.800	0,0835	0,0730
2.001.108,9 - 2.593.152,3	2.344.571	13.020	0,09199	30.526.315.549	0,1018	0,0882
2.593.152,3 - 4.854.507,1	3.701.575	16.196	0,11443	59.950.714.559	0,1999	0,1442
$\geq 4.854.507,1$	6.957.440	11.636	0,08221	80.956.768.458	0,2699	0,1422
Jumlah		141.534	1,00000	299.895.555.495	1,0000	0,6232
Gini Ratio 2023	0,37683					



Gambar 7 Kurva Lorenz Kecamatan Bojongsari 2023

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023

di Kecamatan Bojongsari kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 21,8%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 35,2%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 43,0% (Tabel 14). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Bojongsari berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 14 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Bojongsari 2023

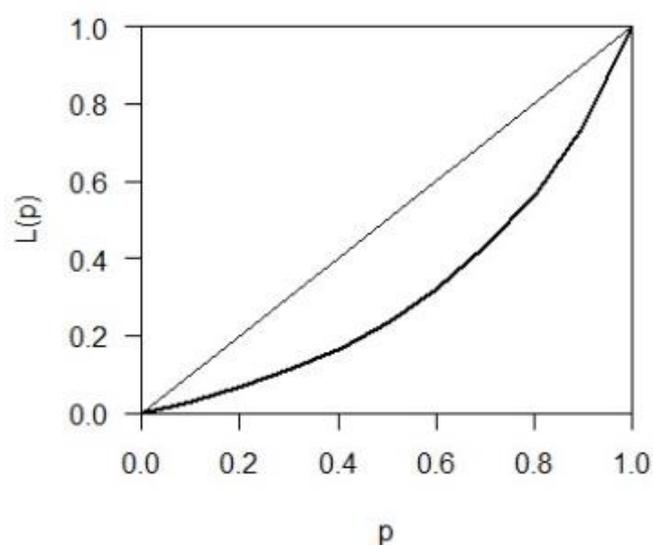
Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	57.604	1.012.539	58.326.325.159	21,8
40% menengah	56.098	1.679.959	94.242.312.114	35,2
20% teratas	27.832	4.133.273	115.037.242.854	43,0
	141.534	6.825.771	267.605.880.127	100

3.5.3. Ketimpangan Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 255.588 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Pancoran Mas tahun 2023, sekitar 10% (26.502 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Pancoran Mas memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 896.496, dan sekitar 9% (25.206 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.6.693.670. Hampir setengah (49,46%) dari jumlah penduduk kecamatan Pancoran Mas yaitu sekitar 126.427 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 2.690.287 (Tabel 15).

Tabel 15 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Pancoran Mas

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_{c-1}]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.071.659,0	896.496	26.502	0,10369	23.758.945.973	0,0281	
1.071.659,0 - 1.455.638,1	1.304.699	26.360	0,10313	34.391.859.943	0,0406	0,0100
1.455.638,1 - 1.574.788,5	1.516.432	25.334	0,09912	38.417.277.499	0,0454	0,0181
1.574.788,5 - 1.874.534,0	1.677.798	26.652	0,10428	44.716.680.193	0,0528	0,0293
1.874.534,0 - 2.690.287,7	2.322.325	24.313	0,09513	56.462.684.696	0,0667	0,0381
2.690.287,7 - 3.376.288,9	3.002.531	24.270	0,09496	72.871.416.502	0,0861	0,0526
3.376.288,9 - 4.057.200,2	3.699.750	26.011	0,10177	96.234.201.879	0,1137	0,0767
4.057.200,2 - 4.809.820,4	4.419.559	25.550	0,09997	112.919.744.664	0,1334	0,1000
4.809.820,4 - 6.693.670,4	5.846.788	25.390	0,09934	148.449.956.512	0,1754	0,1301
>=6.693.670,4	8.652.618	25.206	0,09862	218.097.884.750	0,2577	0,1718
Jumlah		255.588	1,00000	846.320.652.613	1,0000	0,6266
Gini Ratio 2023	0,37340					



Gambar 8 Kurva Lorenz Kecamatan Pancoran Mas 2023

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2023 sebesar 0,37340. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Pancoran Mas pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Pancoran

Mas untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 8).

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Pancoran Mas kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 19,1%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 41,0%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 39,9% (Tabel 16). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Pancoran Mas berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 16 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Pancoran Mas 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	104.848	1.348.856	141.424.879.922	19,1
40% menengah	100.144	3.038.352	304.272.687.220	41,0
20% teratas	50.596	5.859.318	296.458.055.034	39,9
	255.588	10.246.526	742.155.622.176	100

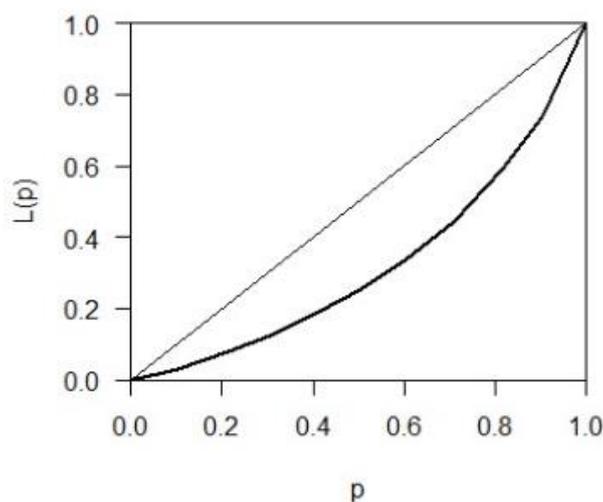
3.5.4. Ketimpangan Kecamatan Cipayung Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Cipayung pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 179.019 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Cipayung tahun 2023, sekitar 10% (18.178 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Cipayung memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 700.560, dan sekitar 9% (17.326 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.6.362.529. Hampir setengah (49,37%) dari jumlah penduduk kecamatan Cipayung yaitu

sekitar 88.389 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 1.748.913 (Tabel 17).

Tabel 17 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cipayang

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_{c-1}]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
$\leq 980.389,3$	700.560	18.178	0,10154	12.734.783.776	0,0303	
980.389,3 - 1.087.973,8	1.052.749	19.994	0,11169	21.048.656.360	0,0500	0,0124
1.087.973,8 - 1.226.299,3	1.159.474	16.440	0,09183	19.061.757.261	0,0453	0,0189
1.226.299,3 - 1.562.863,2	1.379.939	19.270	0,10764	26.591.417.663	0,0632	0,0339
1.562.863,2 - 1.748.913,7	1.671.935	16.748	0,09355	28.001.572.797	0,0666	0,0416
1.748.913,7 - 2.020.912,8	1.932.640	17.181	0,09597	33.204.690.024	0,0789	0,0566
2.020.912,8 - 2.866.538,6	2.448.763	19.301	0,10782	47.263.568.184	0,1124	0,0842
2.866.538,6 - 3.326.889,1	3.168.983	18.969	0,10596	60.112.442.344	0,1429	0,1098
3.326.889,1 - 5.068.873,1	3.995.998	15.612	0,08721	62.385.516.343	0,1483	0,1158
$\geq 5.068.873,1$	6.362.529	17.326	0,09678	110.237.169.929	0,2621	0,1682
Jumlah		179.019	1,00000	420.641.574.682	1,0000	0,6413
Gini Ratio 2023	0,35872					



Gambar 9 Kurva Lorenz Kecamatan Cipayang 2023

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Cipayang pada tahun 2023 sebesar 0,35872. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan

pengeluaran di Kecamatan Cipayung pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Cipayung untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 9).

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Cipayung kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 21,3%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 40,3%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 38,4% (Tabel 18). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Cipayung berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 18 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cipayung 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	73.882	1.073.180	79.288.717.961	21,3
40% menengah	72.199	2.081.719	150.298.025.407	40,3
20% teratas	32.938	4.341.781	143.009.579.637	38,4
	179.019	7.496.680	372.596.323.006	100

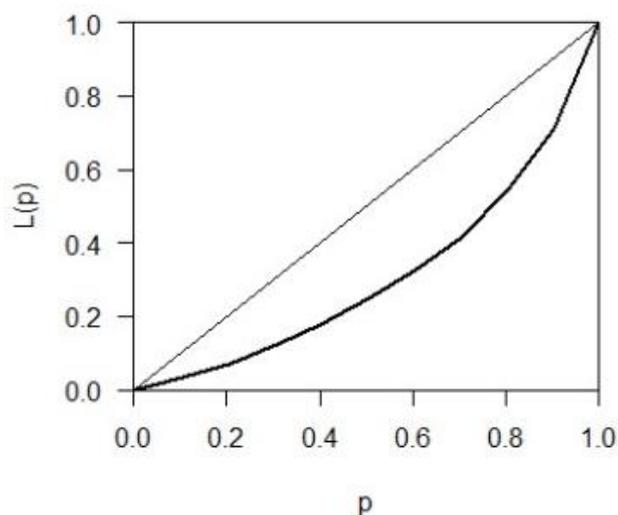
3.5.5. Ketimpangan Kecamatan Sukmajaya Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 263.476 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Sukmajaya tahun 2023, sekitar 10% (27.862 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Sukmajaya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 694.842, dan sekitar 9% (25.426 jiwa)

memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.6.899.373. Hampir setengah (49,64%) dari jumlah penduduk kecamatan Sukmajaya yaitu sekitar 130.810 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 1.691.595 (Tabel 19).

Tabel 19 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Sukmajaya

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_{c-1}]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=838.210,1	694.842	27.862	0,10575	19.359.680.824	0,0319	
838.210,1 - 987.174,4	906.074	26.515	0,10064	24.024.540.269	0,0395	0,0104
987.174,4 - 1.298.763,4	1.159.095	28.553	0,10837	33.095.652.600	0,0545	0,0214
1.298.763,4 - 1.450.720,5	1.367.087	22.719	0,08623	31.058.838.393	0,0511	0,0261
1.450.720,5 - 1.691.595,2	1.598.212	27.017	0,10254	43.178.890.609	0,0711	0,0436
1.691.595,2 - 1.846.751,4	1.782.455	26.564	0,10082	47.349.131.991	0,0779	0,0579
1.846.751,4 - 2.351.274,3	2.022.296	26.586	0,10090	53.764.764.723	0,0885	0,0747
2.351.274,3 - 3.650.117,9	2.979.129	26.977	0,10239	80.367.975.779	0,1323	0,0984
3.650.117,9 - 4.739.408,1	3.955.965	25.257	0,09586	99.915.799.672	0,1645	0,1206
>=4.739.408,1	6.899.373	25.426	0,09650	175.423.446.156	0,2887	0,1651
Jumlah		263.476	1,00000	607.538.721.015	1,0000	0,6182
Gini Ratio 2023	0,38175					



Gambar 10 Kurva Lorenz Kecamatan Sukmajaya 2023

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung *Gini Ratio* didapatkan Angka *Gini*

Ratio Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2023 sebesar 0,38175. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Sukmajaya untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 10).

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Sukmajaya kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 20,9%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 37,9%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 41,2% (Tabel 20). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Sukmajaya berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 20 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Sukmajaya 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	105.649	1.031.774	109.005.924.849	20,9
40% menengah	107.144	1.846.297	197.819.666.384	37,9
20% teratas	50.683	4.249.105	215.357.368.603	41,2
	263.476	7.127.176	522.182.959.836	100

3.5.6. Ketimpangan Kecamatan Cilodong Tahun 2023

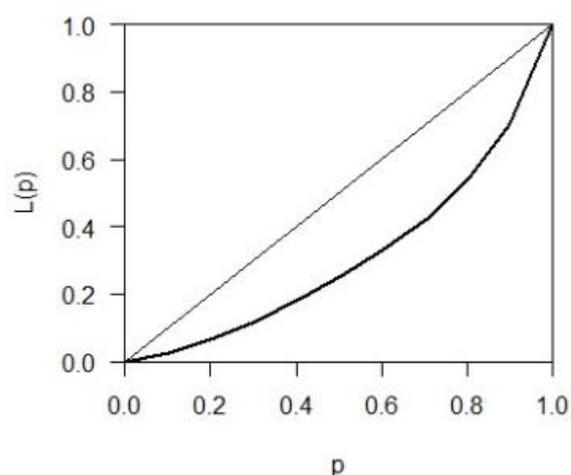
Jumlah penduduk Kecamatan Cilodong pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 175.460 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Cilodong tahun 2023, sekitar 10% (18.098 jiwa)

dari jumlah penduduk Kecamatan Cilodong memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 645.704, dan hampir 10% (17.508 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.7.391.663. Hampir setengah (49,69%) dari jumlah penduduk kecamatan Cilodong yaitu sekitar 87.187 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 1.866.165 (Tabel 21).

Tabel 21 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cilodong

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p * [F_c + F_c - 1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=815.841,5	645.704	18.098	0,10315	11.685.955.768	0,0266	
815.841,5 - 1.104.685,5	1.002.102	18.515	0,10552	18.553.911.447	0,0422	0,0101
1.104.685,5 - 1.413.438,2	1.251.372	17.213	0,09810	21.539.870.820	0,0490	0,0183
1.413.438,2 - 1.716.214,1	1.650.537	18.953	0,10802	31.282.629.970	0,0711	0,0331
1.716.214,1 - 1.866.165,0	1.782.661	15.494	0,08831	27.620.555.852	0,0628	0,0389
1.866.165,0 - 2.001.963,0	1.941.221	17.248	0,09830	33.482.185.719	0,0761	0,0570
2.001.963,0 - 2.574.961,9	2.343.103	19.127	0,10901	44.816.539.537	0,1019	0,0826
2.574.961,9 - 3.392.666,5	3.070.806	17.208	0,09807	52.842.428.214	0,1202	0,0961
3.392.666,5 - 4.814.585,9	4.258.370	16.096	0,09174	68.542.716.296	0,1559	0,1152
>=4.814.585,9	7.391.663	17.508	0,09978	129.413.231.364	0,2943	0,1702
Jumlah		175.460	1,00000	439.780.024.986	1,0000	0,6214
Gini Ratio 2023	0,37862					

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung *Gini Ratio* didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Cilodong pada tahun 2023 sebesar 0,37862. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cilodong pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Cilodong untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 11).



Gambar 11 Kurva Lorenz Kecamatan Cilodong 2023

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Cilodong kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 22,1%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 39,5%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 38,4% (Tabel 22). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Cilodong berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 22 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cilodong 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	72.779	1.137.429	82.780.931.803	22,1
40% menengah	69.077	2.142.511	147.998.199.838	39,5
20% teratas	33.604	4.289.458	144.142.940.915	38,4
	175.460	7.569.397	374.922.072.555	100

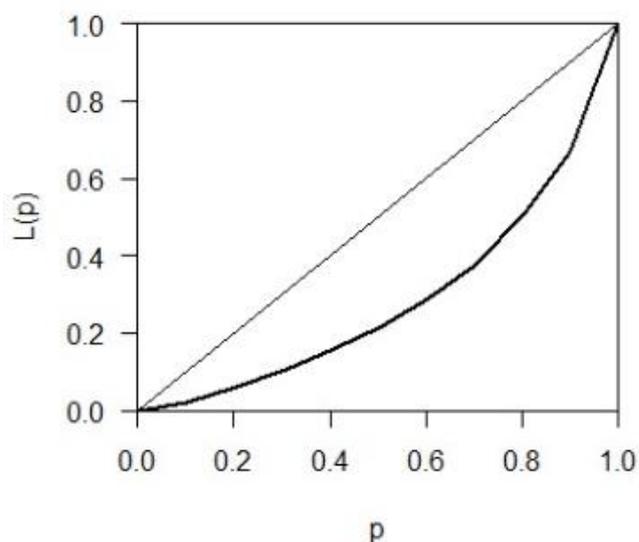
3.5.7. Ketimpangan Kecamatan Cimanggis Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Cimanggis pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 262.927 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Cimanggis tahun 2023, sekitar 10% (27.214 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Cimanggis memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 712.492, dan hampir 10% (26.201 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.11.395.694. Hampir setengah (49,33%) dari jumlah penduduk kecamatan Cimanggis yaitu sekitar 129.714 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 2.159.489 (Tabel 23).

Tabel 23 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cimanggis

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp*[Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=921.081,8	712.492	27.214	0,10350	19.389.760.547	0,0215	
921.081,8 - 1.375.722,5	1.263.728	27.189	0,10341	34.359.499.377	0,0381	0,0084
1.375.722,5 - 1.639.681,0	1.562.796	26.413	0,10046	41.278.133.471	0,0457	0,0166
1.639.681,0 - 1.849.584,1	1.775.468	26.423	0,10050	46.913.182.839	0,0520	0,0264
1.849.584,1 - 2.159.489,5	2.063.556	25.974	0,09879	53.598.792.890	0,0594	0,0369
2.159.489,5 - 2.710.612,5	2.582.294	25.758	0,09797	66.514.724.172	0,0737	0,0497
2.710.612,5 - 3.826.723,6	3.062.806	25.201	0,09585	77.185.784.631	0,0855	0,0638
3.826.723,6 - 4.766.379,1	4.436.324	27.872	0,10601	123.649.228.902	0,1370	0,0942
4.766.379,1 - 6.738.000,3	5.721.447	24.682	0,09387	141.216.759.993	0,1564	0,1110
>=6.738.000,3	11.395.694	26.201	0,09965	298.578.570.375	0,3308	0,1663
Jumlah		262.927	1,00000	902.684.437.198	1,0000	0,5733
Gini Ratio 2023	0,42674					

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Cimanggis pada tahun 2023 sebesar 0,42674. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cimanggis pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Cimanggis untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 12).



Gambar 12 Kurva Lorenz Kecamatan Cimanggis 2023

Tabel 24 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cimanggis 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	107.239	1.328.621	142.479.983.952	19,6
40% menengah	104.805	2.735.943	286.740.551.343	39,4
20% teratas	50.883	5.884.973	299.445.067.984	41,1
	262.927	9.949.537	728.665.603.279	100

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Cimanggis kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 19,6%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 39,4%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 41,1% (Tabel 24). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Cimanggis berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

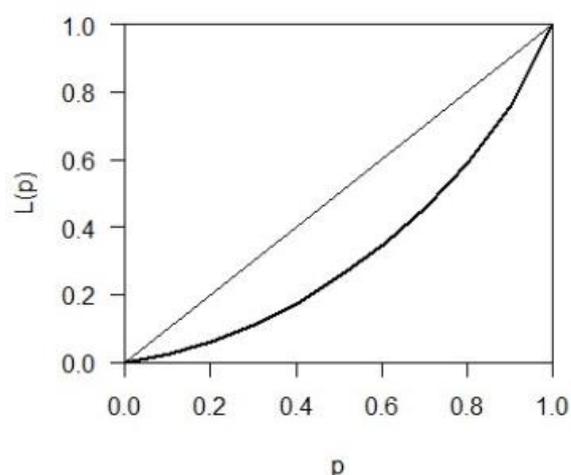
3.5.8. Ketimpangan Kecamatan Tapos Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Tapos pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 274.771 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Tapos tahun 2023, sekitar 10% (29.235 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Tapos memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 749.855, dan hampir 10% (27.323 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.7.720.053. Hampir setengah (49,4%) dari jumlah penduduk kecamatan Tapos yaitu sekitar 135.734 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 2.719.168 (Tabel 25).

Tabel 25 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Tapos

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p^*[F_c+F_{c-1}]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=978.155,8	749.855	29.235	0,10640	21.922.008.394	0,0254	
978.155,8 - 1.397.164,1	1.158.114	26.433	0,09620	30.612.417.541	0,0354	0,0083
1.397.164,1 - 1.719.279,5	1.581.445	27.112	0,09867	42.876.138.373	0,0496	0,0169
1.719.279,5 - 2.236.034,8	1.933.694	27.968	0,10179	54.081.543.015	0,0626	0,0289
2.236.034,8 - 2.719.168,3	2.525.956	28.289	0,10295	71.456.756.327	0,0827	0,0441
2.719.168,3 - 3.352.862,8	2.991.564	27.773	0,10108	83.084.708.519	0,0962	0,0614
3.352.862,8 - 3.787.481,4	3.511.500	26.240	0,09550	92.141.758.654	0,1066	0,0774
3.787.481,4 - 4.649.771,8	4.263.804	27.380	0,09965	116.742.948.535	0,1351	0,1049
4.649.771,8 - 6.053.046,8	5.185.834	27.018	0,09833	140.110.859.080	0,1622	0,1327
>=6.053.046,8	7.720.053	27.323	0,09944	210.935.004.593	0,2441	0,1746
Jumlah		274.771	1,00000	863.964.143.031	1,0000	0,6492
Gini Ratio 2023	0,35085					

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Tapos pada tahun 2023 sebesar 0,35085. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Tapos pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Tapos untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 13).



Gambar 13 Kurva Lorenz Kecamatan Tapos 2023

Tabel 26 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Tapos 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	110.748	1.355.777	150.149.569.409	19,3
40% menengah	109.682	3.050.583	334.594.004.400	43,0
20% teratas	54.341	5.397.801	293.321.890.232	37,7
	274.771	9.804.160	778.065.464.041	100

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Tapos kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 19,3%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 43,0%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 37,7% (Tabel 26). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Tapos berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

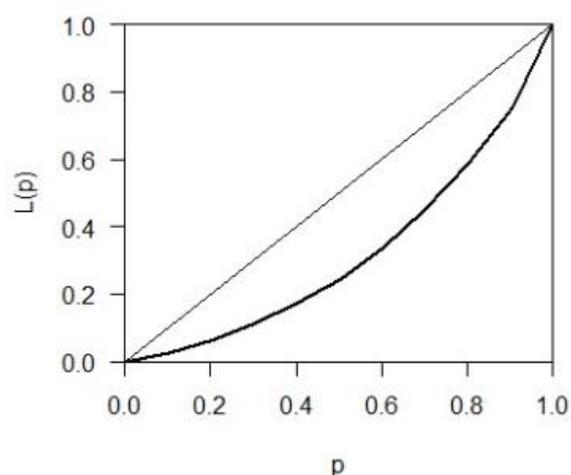
3.5.9. Ketimpangan Kecamatan Beji Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Beji pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 179.159 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Beji tahun 2023, sekitar 10% (18.555 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Beji memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 787.850, dan sekitar 9% (16.643 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.8.713.808. Hampir setengah (49,54%) dari jumlah penduduk kecamatan Beji yaitu sekitar 88.755 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 2.683.166 (Tabel 27).

Tabel 27 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Beji

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p * [F_c + F_c - 1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.070.789,8	787.850	18.555	0,10357	14.618.565.949	0,0248	
1.070.789,8 - 1.401.081,4	1.309.111	19.013	0,10612	24.890.121.057	0,0422	0,0097
1.401.081,4 - 1.811.631,8	1.634.556	17.108	0,09549	27.963.978.998	0,0474	0,0173
1.811.631,8 - 2.005.806,2	1.941.988	17.429	0,09728	33.846.916.484	0,0573	0,0278
2.005.806,2 - 2.683.166,4	2.320.898	18.299	0,10214	42.470.115.209	0,0719	0,0424
2.683.166,4 - 3.529.967,2	3.051.601	18.130	0,10120	55.325.524.006	0,0937	0,0588
3.529.967,2 - 4.160.465,3	3.875.769	17.242	0,09624	66.826.013.298	0,1132	0,0758
4.160.465,3 - 4.752.812,7	4.392.179	18.489	0,10320	81.206.993.180	0,1376	0,1072
4.752.812,7 - 6.055.253,9	5.376.926	18.251	0,10187	98.134.274.271	0,1662	0,1368
>=6.055.253,9	8.713.808	16.643	0,09290	145.023.907.589	0,2457	0,1630
Jumlah		179.159	1,00000	590.306.410.041	1,0000	0,6388
Gini Ratio 2023	0,36123					

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Beji pada tahun 2023 sebesar 0,36123. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Beji pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Beji untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 14).



Gambar 14 Kurva Lorenz Kecamatan Beji 2023

Tabel 28 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Beji 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	72.105	1.418.376	102.272.024.962	19,3
40% menengah	72.160	3.213.746	231.903.928.183	43,9
20% teratas	34.894	5.573.477	194.480.912.268	36,8
	179.159	10.205.600	528.656.865.412	100

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Beji kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 19,3%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 43,9%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 36,8% (Tabel 28). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Beji berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

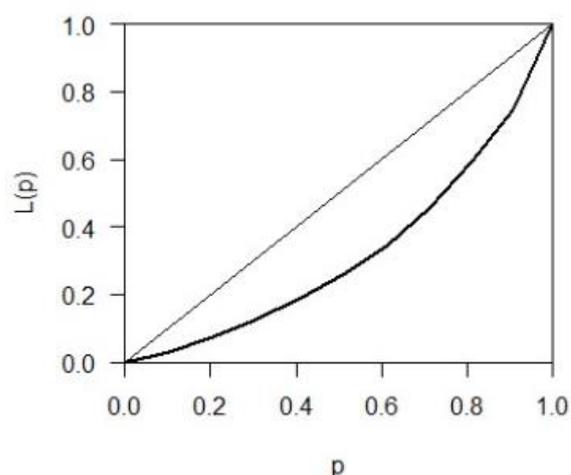
3.5.10. Ketimpangan Kecamatan Limo Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Limo pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 120.729 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Limo tahun 2023, sekitar 10% (12.564 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Limo memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 624.702, dan sekitar 9% (11.419 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.5.845.148. Hampir setengah (49,13%) dari jumlah penduduk kecamatan Limo yaitu sekitar 59.318 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 1.614.639 (Tabel 29).

Tabel 29 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Limo

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p * [F_c + F_c - 1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=799.288,1	624.702	12.564	0,10407	7.848.756.485	0,0296	
799.288,1 - 1.001.894,1	947.404	12.301	0,10189	11.654.011.915	0,0440	0,0105
1.001.894,1 - 1.220.882,0	1.155.227	11.740	0,09724	13.562.361.329	0,0512	0,0193
1.220.882,0 - 1.405.969,6	1.338.802	13.128	0,10874	17.575.793.353	0,0664	0,0344
1.405.969,6 - 1.614.639,8	1.527.649	11.678	0,09673	17.839.883.638	0,0674	0,0435
1.614.639,8 - 1.960.344,9	1.801.615	12.582	0,10422	22.667.920.575	0,0856	0,0628
1.960.344,9 - 2.853.925,7	2.476.192	12.126	0,10044	30.026.301.063	0,1134	0,0805
2.853.925,7 - 3.214.852,1	3.091.806	11.661	0,09659	36.053.548.580	0,1361	0,1015
3.214.852,1 - 3.752.153,6	3.542.364	11.530	0,09550	40.843.457.358	0,1542	0,1281
>=3.752.153,6	5.845.148	11.419	0,09458	66.745.740.259	0,2520	0,1653
Jumlah		120.729	1,00000	264.817.774.555	1,0000	0,6461
Gini Ratio 2023	0,35393					

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Limo pada tahun 2023 sebesar 0,35393. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Limo pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Limo untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 15).



Gambar 15 Kurva Lorenz Kecamatan Limo 2023

Tabel 30 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Limo 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	49.733	1.016.534	50.555.265.594	21,5
40% menengah	48.047	2.079.254	99.901.910.551	42,5
20% teratas	22.949	3.686.858	84.609.695.841	36,0
	120.729	6.782.645	235.066.871.986	100

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Limo kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 21,5%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 42,5%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 36,0% (Tabel 30). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Limo berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

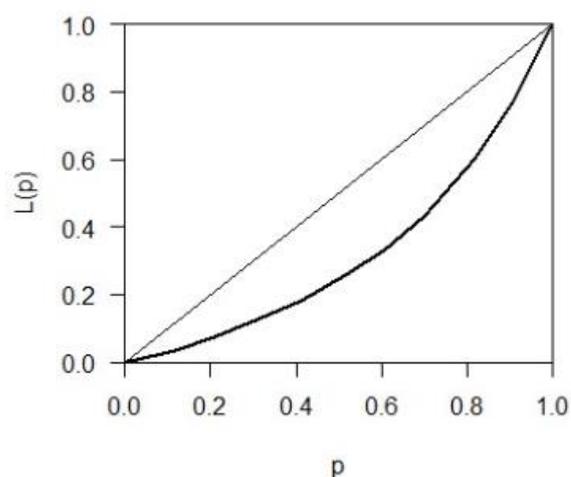
3.5.11. Ketimpangan Kecamatan Cinere Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Cinere pada tahun 2023 diproyeksi mencapai 106.058 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kecamatan Cinere tahun 2023, sekitar 11% (12.413 jiwa) dari jumlah penduduk Kecamatan Cinere memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah yaitu Rp. 937.512, dan sekitar 9% (9.349 jiwa) memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi yaitu Rp.8.223.936. Hampir setengah (48,55%) dari jumlah penduduk kecamatan Cinere yaitu sekitar 51.487 jiwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di atas Rp. 2.489.862 (Tabel 31).

Tabel 31 Hitung Gini Ratio Tahun 2023 di Kecamatan Cinere

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	$f_p * [F_c + F_c - 1]$
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=1.231.189,2	937.512	12.413	0,11704	11.637.331.770	0,0337	
1.231.189,2 - 1.614.407,9	1.425.380	9.615	0,09066	13.705.027.270	0,0397	0,0097
1.614.407,9 - 1.730.651,3	1.704.332	11.150	0,10513	19.003.302.180	0,0550	0,0212
1.730.651,3 - 1.952.091,6	1.845.430	10.368	0,09776	19.133.422.640	0,0554	0,0305
1.952.091,6 - 2.489.862,8	2.264.228	11.025	0,10395	24.963.109.001	0,0723	0,0457
2.489.862,8 - 3.028.949,0	2.768.156	9.429	0,08890	26.100.941.899	0,0756	0,0522
3.028.949,0 - 3.830.189,5	3.415.302	10.302	0,09714	35.184.445.739	0,1019	0,0743
3.830.189,5 - 5.809.822,2	4.741.230	12.260	0,11560	58.127.482.382	0,1683	0,1197
5.809.822,2 - 6.068.030,9	5.976.591	10.147	0,09567	60.644.469.986	0,1756	0,1320
>=6.068.030,9	8.223.936	9.349	0,08815	76.885.575.766	0,2226	0,1567
Jumlah		106.058	1,00000	345.385.108.633	1,0000	0,6420
Gini Ratio 2023	0,35796					

Selanjutnya berdasarkan Tabel Hitung Gini Ratio didapatkan Angka Gini Ratio Kecamatan Cinere pada tahun 2023 sebesar 0,35796. Berdasarkan nilai tersebut, ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kecamatan Cinere pada tahun 2023 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kecamatan Cinere untuk tahun 2023, ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 16).



Gambar 16 Kurva Lorenz Kecamatan Cinere 2023

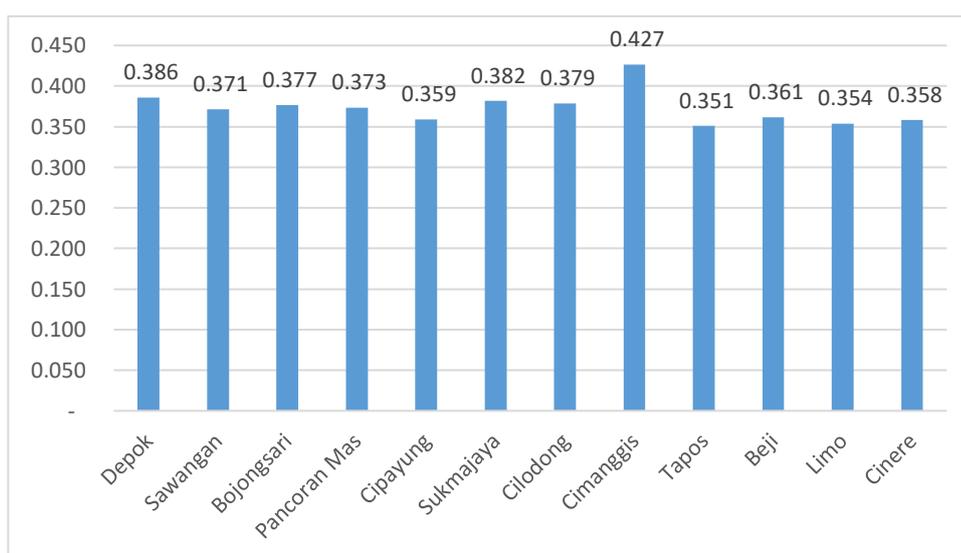
Tabel 32 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Cinere 2023

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Rataan per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	43.546	1.478.163	64.368.107.034	21,0
40% menengah	43.016	2.926.518	125.887.107.896	41,0
20% teratas	19.496	5.989.706	116.775.311.909	38,0
	106.058	10.394.388	307.030.526.839	100

Berdasarkan kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia, pada Tahun 2023 di Kecamatan Cinere kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 21,0%, kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 41,0%, dan kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 38,0% (Tabel 32). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kecamatan Cinere berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2023 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

3.6. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok Tahun 2023

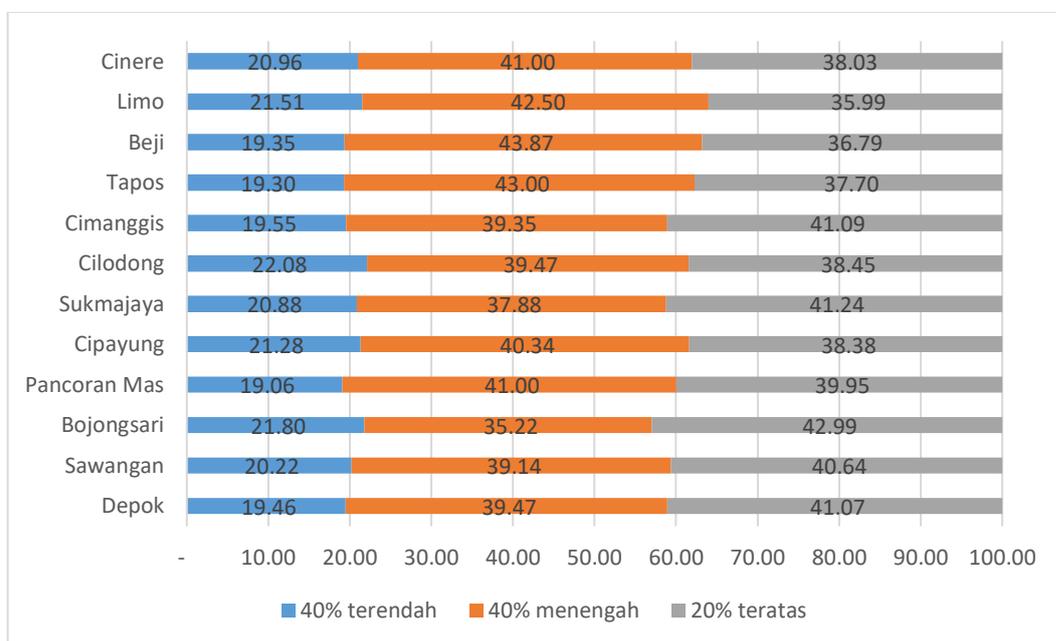
Nilai Gini Ratio kecamatan di Kota Depok tahun 2023 berkisar antara 0,351 sampai dengan 0,427. Kecamatan Cimanggis memiliki nilai Gini Ratio berada di atas ketimpangan Kota Depok yaitu 0,427. Sementara 10 kecamatan lainnya memiliki nilai ketimpangan di bawah nilai Gini Ratio Kota Depok. Semuan ketimpangan kecamatan di Kota Depok terkategori sedang pada tahun 2023 (Gambar 17).



Gambar 17 Nilai Gini Ratio Kecamatan Kota Depok 2023

Perbandingan ketimpangan kecamatan Kota Depok jika dilihat berdasarkan kriteria Bank Dunia, yaitu dengan mengukur persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk, maka semua kecamatan di kota Depok terkategori ketimpangan rendah, karena persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk di atas 17% (Gambar 18). Persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tertinggi dimiliki oleh kecamatan Cilodong yaitu sebesar 22,08%. Persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% menengah

kecamatan Bojongsari menjadi persentase pengeluaran terkecil jika dibandingkan kecamatan lainnya. Sementara, kelompok pengeluaran untuk 20% teratas, persentase pengeluaran kecamatan Bojongsari juga merupakan tertinggi dibandingkan sepuluh kecamatan lainnya.

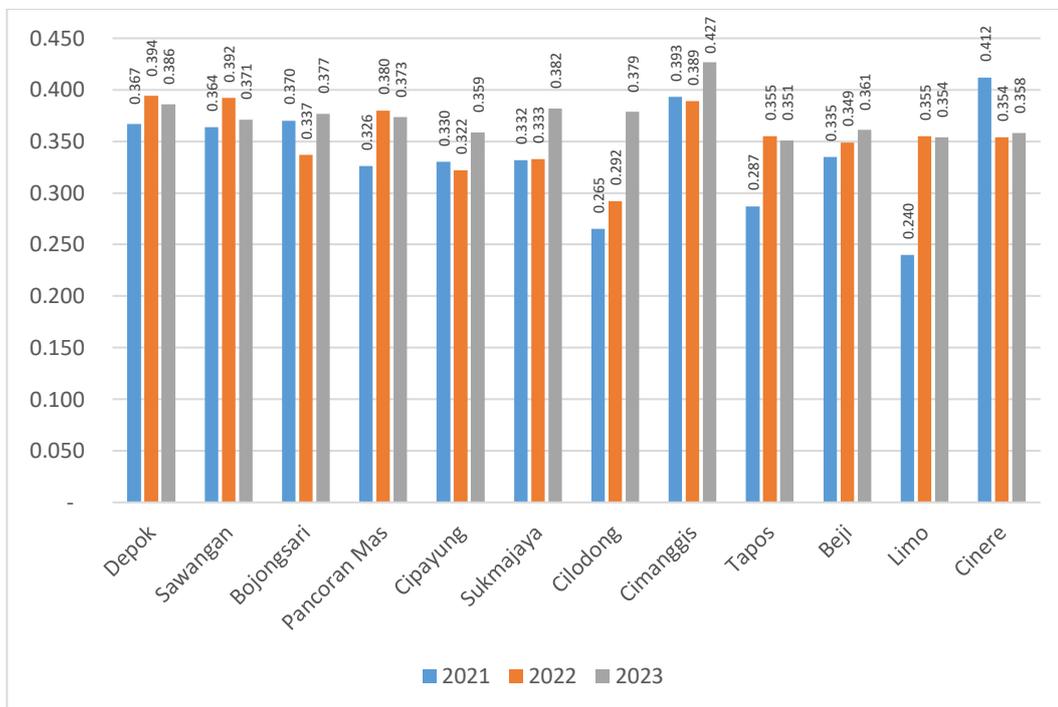


Gambar 18 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok 2023

3.7. Perbandingan Ketimpangan antar Kecamatan Kota Depok tahun 2021-2023

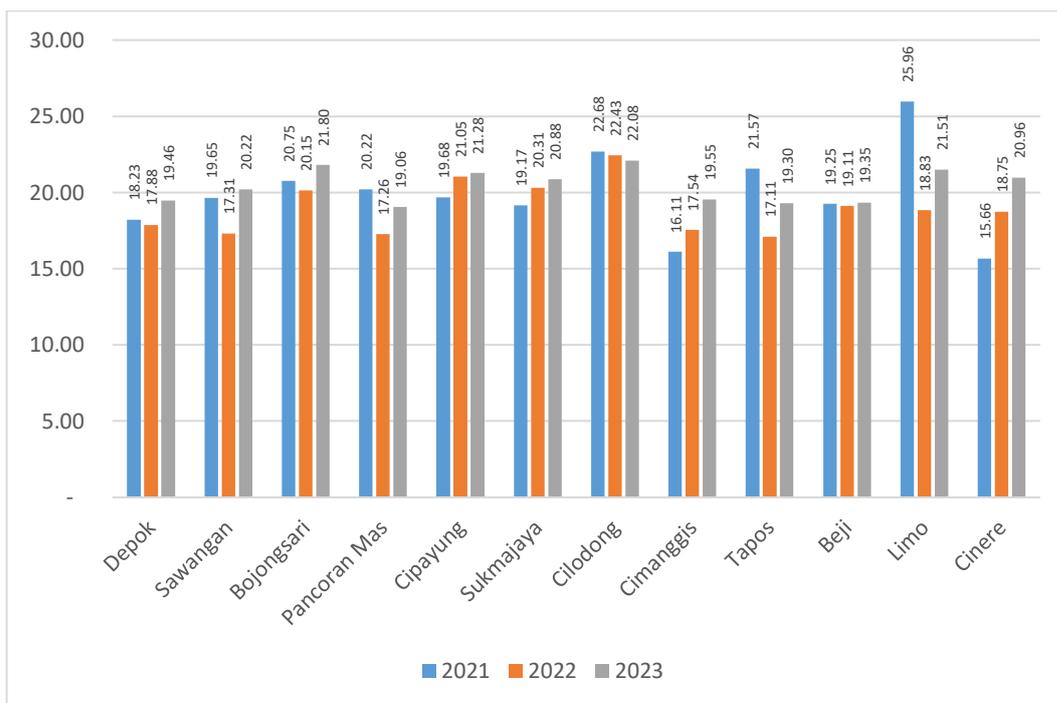
Selama tiga tahun terakhir (2021-2023), ketimpangan antar kecamatan di kota Depok umumnya berada dalam kriteria ketimpangan sedang (nilai gini ratio antara 0,3-0,5), meskipun ada beberapa kecamatan pada tahun tertentu masuk dalam kriteria ketimpangan rendah (nilai gini ratio kurang dari 0,3), seperti kecamatan Cilodong, Tapos dan Limo pada tahun 2021. Namun selama tiga tahun terakhir tidak ada kecamatan yang masuk kriteria ketimpangan tinggi (nilai gini ratio lebih dari 0,5). Nilai gini ratio tertinggi terjadi di kecamatan Cimanggis pada tahun 2023 (0,427) diikuti Cinere pada tahun 2021 (0,412). Sedangkan nilai gini ratio terendah terjadi di kecamatan Limo pada tahun 2021 (Gambar 19).

Pola pergerakan nilai gini ratio dari tahun 2021-2023 di kecamatan-kecamatan kota Depok berbeda-beda. Kecamatan Sukmajaya, Cilodong dan Beji, nilai gini ratio cenderung naik dari tahun 2021-2023. Sementara kecamatan-kecamatan lainnya, nilai gini ratio dari tahun 2021-2023 polanya naik turun/turun naik.



Gambar 19 Nilai Gini Ratio Kecamatan Kota Depok Tahun 2021 – 2023

Secara umum, kriteria ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia (Gambar 20) masuk dalam kategori rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk berada lebih dari 17%. Dua kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di kota Depok, memiliki ketimpangan dalam kriteria sedang di tahun 2021, yaitu kecamatan Cimanggis dan Cinere, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk berada antara 12 sd 17%. Namun pada tahun 2022 dan 2023, kedua kecamatan tersebut masuk pada kategori rendah seperti kecamatan lainnya.



Gambar 20 Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terendah Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kecamatan Kota Depok Tahun 2021-2023

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) Indeks Gini Kota Depok Tahun 2023 sebesar 0.386 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang.
- b) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% terendah di Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 19.46%, sehingga tergolong pada ketimpangan rendah.
- c) Berdasarkan Indeks Gini di Kota Depok pada periode sepuluh tahun terakhir (2013-2023), ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Meskipun Indeks Gini 2023 Kota Depok diproyeksi lebih rendah 0.008 poin dibandingkan tahun 2022.
- d) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, selama periode 2021 sampai dengan 2023, di Kota Depok selalu berada pada tingkat ketimpangan rendah.
- e) Berdasarkan kriteria Gini Rasio, semua kecamatan di Kota Depok terkategori ketimpangan sedang dengan nilai Gini Rasio masing-masing kecamatan sebagai berikut: 0,351 (Tapos); 0,354 (Limo); 0,358 (Cinere); 0,359 (Cipayung); 0,361 (Beji); 0,371 (Sawangan); 0,373 (Pancoran Mas); 0,377(Bojongsari); 0,379 (Cilodong); dan 0,382 (Sukmajaya); 0,427 (Cimanggis).
- f) Berdasarkan kriteria Bank Dunia, semua kecamatan di kota Depok terkategori ketimpangan rendah karena persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk di atas 17%.

4.2. Saran

- a) Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama tahun 2013-2023 cukup tinggi, yang selalu di atas 6%. Namun, tahun 2020 menjadi tahun yang mengguncang ketika pandemi COVID-19 melanda, menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum merata terdistribusi di antara berbagai lapisan masyarakat. Mayoritas manfaat masih dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Depok untuk fokus pada pembangunan yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Depok harus secara aktif mencari berbagai solusi kreatif. Prioritas utama harus diberikan pada golongan masyarakat yang hingga saat ini belum merasakan dampak positif dari hasil pembangunan. Upaya-upaya inovatif dan inklusif harus menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan, sehingga setiap warga dapat ikut serta dalam kemajuan Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*. 1–20
- de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kemenparekraf. 2014. *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- The Equality Trust. 2011. "Income inequality: Trends and Measures." *Equality Trust Research Digest*; no.2: pp.1–8
- Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER).
- Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. ADBI Working Paper Series.
- World Bank. 2016. *Indonesia's rising divide*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>
-



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok**

Gedung Dibaleka II
Komplek Balaikota Depok Lantai 7
Jalan Margonda Raya no 54 Depok
Telp: (021) 29402276 dan (021) 7764410
Email: diskominfo@depok.go.id

